

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TINGKAT PENUNTUTAN
TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH
(Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah)**

FAUZAN AZMI
MUHAMMAD HATTA
MANFARISYAH

Abstrak

Permasalahan utama dalam tesis ini adalah penerapan RJ di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah terdapat perkara yang di tolak seperti proses perdamaian Perkara dengan Nomor Register Perkara Tahap Penuntutan PDM-327/L.1.17/02/2022, kasus ini merupakan dugaan terhadap tersangka melakukan tindak pidana Penyerobotan tanah sebagaimana diatur pada Pasal 385 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang diterima di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah pada Tanggal 11 Februari 2022 dari Penyidik. Dari persoalan itu terdapat beberapa pertanyaan dan sekaligus dijadikan rumusan permasalahan dalam penyusunan tesis ini, seperti bagaimanakah penerapan konsep *restorative justice* dalam tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di daerah hukum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dan bagaimanakah hambatan yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dalam penerapan *restorative justice*?

Penelitian bertujuan menganalisis penerapan penolakan *restorative justice* pada perkara PDM-327/L.1.17/02/2022 di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dimana jenis penyelidikan ini menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa, pengetahuan, atau objek studi. Lebih lanjut dalam pelaporan penelitian ini bersifat atau menggunakan metode perspektif. Adapun pendekatan penelitian adalah yuridis empiris atau penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data dengan cara penelitian dokumen atau penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, adapun mengumpulkan data di lapangan melalui wawancara dan observasi.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penolakan perkara *restorative justice* pada perkara PDM-327/L.1.17/02/2022 di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah adalah (1) Nomor Register Perkara Tahap Penuntutan PDM-327/L.1.17/02/2022 tentang pertanahan yang kedepannya Kejaksaan Agung khawatir akan terjadi sengketa di bidang perdata antar pihak yang bersengketa. (2) Jaksa Agung menganggap harus melalui proses hukum yang inkrah lewat pengadilan.

Di akhir penelitian ini, saran dari penelitian adalah untuk penerapan asas *restorative justice* di sosialisasikan kepada masyarakat agar memahami tentang aturan dan pendekatan restoratif. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 khususnya dalam Pasal 5 harusnya dijelaskan lebih spesifik tentang tindak pidana apa saja yang dapat di laksanakan dalam *restorative justice*. JPU dibekali pemahaman lebih dalam terkait dengan penerapan asas *Restorative Justice*.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penyelesaian, *Restorative Justice*, Hukum

**IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE AT THE LEVEL OF
PROSECUTION OF THE CRIMINAL ACTION OF LAND GRABING
(Research Study at the Central Aceh District Attorney)**

FAUZAN AZMI
MUHAMMAD HATTA
MANFARISYAH

Abstract

The main problem in this thesis is the application of RJ at the Central Aceh District Attorney's Office, there are cases that are rejected, such as the reconciliation process. Cases with Case Register Number Prosecution Phase PDM-327/L.1.17/02/2022, this case is an allegation of the suspect committing a crime of expropriation land as regulated in Article 385 Jo. Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code received at the Central Aceh District Attorney on February 11, 2022 from investigators. From this problem there are several questions and at the same time it is used as a formulation of the problem in the preparation of this thesis, such as how is the application of the concept of restorative justice in the prosecution stage by the Public Prosecutor in the jurisdiction of the Central Aceh District Prosecutor's Office and what are the obstacles faced by the Public Prosecutor at the Central Aceh District Prosecutor's Office in application of restorative justice?.

The research aims to analyze the application of the rejection of restorative justice in the PDM-327/L.1.17/02/2022 case at the Central Aceh District Attorney's Office. This type of research is qualitative, where this type of investigation uses data in the form of written or spoken sentences, events, knowledge, or objects of study. Further in the reporting of this research is or uses the perspective method. The research approach is empirical juridical or empirical legal research. Data collection techniques by means of document research or library research and field research, while collecting data in the field through interviews and observation.

The results of this study conclude that the rejection of restorative justice cases in the PDM-327/L.1.17/02/2022 case at the Central Aceh District Prosecutor's Office is (1) Case Register Number of the Prosecution Stage PDM-327/L.1.17/02/2022 concerning land in the future the Attorney General's Office is worried that there will be civil disputes between the disputing parties. (2) The Attorney General considers that he must go through a thorough legal process through the courts.

At the end of this research, the suggestion from the research is for the application of the principles of restorative justice to be socialized to the public so they understand about restorative rules and approaches. Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020, especially in Article 5, should be explained more specifically about what crimes can be carried out in restorative justice. Prosecutors are equipped with a deeper understanding related to the application of the principles of Restorative Justice.

Keywords: Crime, Settlement, Restorative Justice, Law